

No. 15063

MULTILATERAL

Treaty of amity and co-operation in Southeast Asia (with an agreed common translation into English). Concluded at Denpasar, Bali, on 24 February 1976

*Authentic texts: Indonesian, Malay, Filipino and Thai.
Registered by the Philippines on 20 October 1976.*

MULTILATÉRAL

Traité d'amitié et de coopération dans l'Asie du Sud-Est (avec traduction anglaise convenue). Conclu à Denpasar (Bali) le 24 février 1976

*Textes authentiques : indonésien, malais, philippin et thaï.
Enregistré par les Philippines le 20 octobre 1976.*

[INDONESIAN TEXT — TEXTE INDONÉSISIEN]

PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA

MUKADDIMAH

Pihak-Pihak Agung yang Berjanji:

Sadar akan adanya ikatan sejarah, geografi dan kebudayaan yang saling mengikat rakyat mereka;

Berkeinginan untuk membina perdamaian dan stabilitas wilayah dengan menghormati dan patuh kepada keadilan serta tertib hukum dengan meningkatkan ketahanan regional dalam hubungan antara mereka;

Berkehendak untuk memperkokoh perdamaian, persahabatan dan kerjasama mengenai hal-hal yang menyangkut Asia Tenggara sesuai dengan jiwa dan asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dasa Sila yang ditetapkan oleh Konperensi Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 25 April 1955, Deklarasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang ditanda-tangani di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan Deklarasi yang ditanda-tangani di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Nopember 1971;

Berkeyakinan bahwa penyelesaian perselisihan atau persengketaan antara negara mereka seharusnya diatur oleh tata-cara yang wajar, berdaya-guna dan cukup luwes dengan menghindari sikap-sikap negatif yang dapat membahayakan atau menghambat kerjasama;

Yakin akan perlunya kerjasama dengan semua bangsa yang cinta damai baik di dalam maupun di luar Asia Tenggara, dalam usaha meningkatkan perdamaian dunia, kemantapan dan keserasian;

Dengan khidmat bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama sebagai berikut:

BAB I. TUJUAN DAN ASAS-ASAS

Pasal 1. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk membina perdamaian abadi, persahabatan yang kekal dan kerjasama antara rakyat mereka yang akan memberi sumbangan bagi kekuatan, kesetiakawanan dan hubungan akrab mereka.

Pasal 2. Dalam hubungan mereka satu dengan yang lain, Pihak-Pihak Agung yang Berjanji akan berpedoman pada asas-asas dasar sebagai berikut:

- a. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan kepribadian nasional dari semua bangsa;
- b. Hak setiap Negara untuk melangsungkan kehidupan nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi atau tekanan dari luar;
- c. Tidak campur tangan mengenai urusan dalam negeri satu sama lain;
- d. Penyelesaian perselisihan atau persengketaan dengan cara-cara damai;
- e. Penolakan pengancaman dengan kekerasan atau penggunaan kekerasan;
- f. Kerjasama yang efektif antara mereka.

BAB II. PERSAHABATAN

Pasal 3. Dalam usaha mencapai tujuan Perjanjian ini Pihak-Pihak Agung yang Berjanji akan berikhtiar untuk mengembangkan dan memperkuat ikatan persahabatan berdasarkan tradisi, kebudayaan dan sejarah, hubungan bertetangga baik dan kerjasama yang saling mengikat dan dengan iktikad baik akan memenuhi segala kewajiban yang termaktub dalam Perjanjian ini. Untuk membina saling pengertian yang lebih mendalam antara mereka, Pihak-Pihak Agung yang Berjanji akan mendorong dan memperlancar hubungan dan pergaulan antara rakyat mereka.

BAB III. KERJASAMA

Pasal 4. Pihak-Pihak Agung yang Berjanji akan meningkatkan kerjasama aktif dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi serta juga dalam hal-hal yang menyangkut cita-cita dan aspirasi bersama mengenai perdamaian internasional, stabilitas wilayah dan mengenai hal-hal lain yang menjadi kepentingan bersama.

Pasal 5. Dalam usaha mencapai tujuan-tujuan seperti termaktub dalam Pasal 4, Pihak-Pihak Agung yang Berjanji akan berusaha sekuat-kuatnya, baik secara multilateral maupun bilateral, atas dasar peramaan, tanpa diskriminasi dan atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 6. Pihak-Pihak Agung yang Berjanji akan bekerjasama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi diwilayah ini guna memperkuat dasar bagi terwujudnya suatu masyarakat bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang damai dan makmur. Untuk tujuan ini, mereka akan meningkatkan pemanfaatan yang lebih besar dari usaha pertanian dan industri mereka serta perluasan perdagangan dan perbaikan prasarana ekonomi mereka guna keuntungan bersama rakyat mereka. Dalam hal ini, mereka akan terus mencari segala jalan untuk kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan Negara-Negara lain serta dengan organisasi-organisasi internasional dan regional diluar wilayah ini.

Pasal 7. Guna mencapai keadilan sosial dan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat diwilayah ini, Pihak-Pihak Agung yang Berjanji akan menggiatkan kerjasama ekonomi. Untuk maksud ini, mereka akan menentukan strategi-strategi regional yang tepat untuk pembangunan ekonomi dan untuk saling membantu.

Pasal 8. Pihak-Pihak Agung yang Berjanji akan berikhtiar untuk mencapai kerjasama yang seerat-eratnya dalam tingkatan yang seluas-luasnya dan akan berusaha memberi bantuan kepada satu dan lainnya dalam bentuk latihan-latihan dan fasilitas riset dalam bidang sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.

Pasal 9. Pihak-Pihak Agung yang Berjanji akan berusaha untuk memelihara kerjasama didalam memajukan tujuan-tujuan damai, keserasian dan stabilitas diwilayah ini. Untuk maksud ini, Pihak-Pihak Agung yang Berjanji akan mengatur hubungan tetap dan akan mengadakan musyawarah-musyawarah mengenai masalah internasional dan regional dengan tujuan untuk mengkoordinasikan pandangan, tindakan dan kebijaksanaan mereka.

Pasal 10. Dalam cara atau bentuk apapun, setiap Pihak Agung yang Berjanji tidak akan mengambil bagian dalam kegiatan yang dapat mengancam stabilitas politik dan ekonomi, kedaulatan atau keutuhan wilayah dari Pihak Agung yang Berjanji lainnya.

Pasal 11. Pihak-Pihak Agung yang Berjanji akan berusaha untuk memperkuat ketahanan nasional masing-masing baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya ataupun di bidang keamanan sesuai dengan cita-cita dan aspirasi mereka masing-masing, bebas dari campur tangan dari luar maupun dari kegiatan-kegiatan subversi dalam negeri guna melindungi kepribadian nasional masing-masing.

Pasal 12. Pihak-Pihak Agung yang Berjanji dalam usaha mereka untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan wilayah, akan berusaha untuk bekerjasama dalam segala bidang guna meningkatkan ketahanan regional, berdasarkan asas-asas percaya pada diri dan kemampuan sendiri, saling menghormati, kerjasama dan kesetiakawanan yang akan mewujudkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat bangsa-bangsa yang kuat dan berdaya di Asia Tenggara.

BAB IV. PENYELESAIAN PERSENGKETAAN SECARA DAMAI

Pasal 13. Pihak-Pihak Agung yang Berjanji akan bertekad serta beriktikad baik untuk mencegah timbulnya persengketaan-persengketaan. Dalam hal terjadi persengketaan mengenai hal-hal yang menyangkut mereka secara langsung, khususnya persengketaan yang diperkirakan akan mengganggu perdamaian dan keserasian regional, mereka akan menghindari pengancaman atau penggunaan kekerasan dan senantiasa akan menyelesaikan persengketaan antara mereka tersebut melalui perundingan yang bersahabat.

Pasal 14. Untuk menyelesaikan persengketaan melalui tatacara regional, Pihak-Pihak Agung yang Berjanji akan membentuk suatu Dewan Agung sebagai badan penerus yang terdiri dari seorang Wakil pada tingkat Menteri dari setiap Pihak Agung yang Berjanji untuk memberikan perhatian adanya persengketaan atau adanya keadaan yang diperkirakan dapat mengganggu perdamaian dan keserasian wilayah.

Pasal 15. Di dalam hal tidak tercapai penyelesaian melalui perundingan-perundingan secara langsung, Dewan Agung akan memberikan perhatian terhadap persengketaan atau keadaan tersebut dan akan menyarankan kepada pihak-pihak yang bersengketa cara-cara penyelesaian yang wajar seperti jasa-jasa baik, penengah, penyelidikan atau pendamaian. Dewan Agung dapat pula menawarkan jasa-jasa baiknya, atau atas persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa dapat menjadi suatu Panitia Penengah, Penyelidik atau Pendamai. Apabila dianggap perlu, Dewan Agung akan menyarankan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah memburuknya persengketaan atau keadaan tersebut.

Pasal 16. Ketentuan-ketentuan yang tersebut terdahulu dalam Bab ini tidak akan berlaku untuk suatu persengketaan, kecuali semua pihak yang bersengketa sepakat memberlakukannya terhadap persengketaan tersebut. Namun demikian, hal ini tidak akan mencegah Pihak-Pihak Agung yang Berjanji lainnya yang tidak menjadi pihak dalam persengketaan tersebut untuk menawarkan segala bantuan yang

mungkin guna menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak-pihak yang bersengketa seyogyanya menerima baik tawaran-tawaran bantuan tersebut.

Pasal 17. Tidak ada satu halpun dalam Perjanjian ini yang akan mencegah usaha-usaha perlindungan menurut cara-cara penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pihak-Pihak Agung yang Berjanji yang merupakan pihak-pihak yang bersengketa perlu didorong untuk mengambil prakarsa guna penyelesaian persengketaan tersebut melalui perundingan yang bersahabat sebelum menempuh cara-cara lain seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB V. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 18. Perjanjian ini akan ditanda tangani oleh Republik Indonesia, Malaysia, Republik Pilipina, Republik Singapura dan Kerajaan Thailand. Perjanjian ini akan disyahkan menurut ketentuan perundang-undangan masing-masing negara penandatanganan. Perjanjian ini akan terbuka untuk aksesinya oleh negara-negara lain di Asia Tenggara.

Pasal 19. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal pendepositan Piagam Pengesahan yang kelima pada Pemerintah-Pemerintah Negara penanda-tangan yang ditunjuk sebagai tempat pendepositan Perjanjian ini beserta Piagam Pengesahan atau Piagam Aksesinya

Pasal 20. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa resmi Pihak-Pihak Agung yang Berjanji, yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Juga dibuat suatu naskah terjemahan dalam bahasa Inggris yang disetujui bersama. Setiap perbedaan tafsiran dari naskah tersebut akan diselesaikan melalui perundingan.

UNTUK MENYAKSIKANNYA Pihak-Pihak Agung yang Berjanji telah menandatangani Perjanjian ini dan telah membubuhi meterai masing-masing.

DIBUAT di Denpasar pada tanggal duapuluh empat Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam.

[MALAY TEXT — TEXTE MALAIS]

TRITI PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA

PENDAHULUAN

Pihak-pihak Berjanji Tertinggi:

Sedar tentang pertalian sejarah, ilmu alam dan kebudayaan yang sedia ada dan yang telah mengeratkan hubungan antara rakyat-rakyat mereka;

Ingin memajukan keamanan dan kestabilan wilayah dengan tetap menghormati keadilan dan kaedah-kaedah undang-undang dan mengukuhkan lagi perpaduan wilayah dalam perhubungan mereka;

Berhasrat menghukuhkan keamanan, mengeratkan lagi persahabatan dan menambahkan lagi kerjasama mengenai perkara-perkara yang menyentuh Asia Tenggara selaras dengan semangat dan prinsip Piagam Bangsa-bangsa Bersatu, Sepuluh Prinsip yang diterima oleh Persidangan Asia-Afrika di Bandung pada 25hb April 1955, Perisytiharan Persatuan Negara-negara Asia Tenggara yang ditandatangani di Bangkok pada 8hb Ogos 1967, dan Perisytiharan yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 27hb November 1971;

Yakin bahawa penyelesaian perselisihan atau pertikaian antara negara-negara mereka hendaklah diperaturkan oleh acara-acara yang waras, berkesan dan longgar secukupnya, dengan mengelak sikap negatif yang mungkin membahayakan atau menghalangi kerjasama;

Percaya kepada perlunya bekerjasama dengan semua negara-negara yang mencintai damai, di dalam dan di luar Asia Tenggara, pada mengembangkan keamanan, kestabilan dan kesentosaan dunia;

Sesungguhnya bersetuju membuat suatu Triti Persahabatan dan Kerjasama seperti berikut:

BAB I. MAKSUD DAN PRINSIP

Perkara 1. Tujuan Triti ini ialah untuk memajukan keamanan abadi, persahabatan dan kerjasama yang berkekalan di kalangan rakyat-rakyat mereka dan yang akan menambahkan lagi kekuatan, perpaduan dan eratnya perhubungan mereka.

Perkara 2. Dalam perhubungan mereka antara satu dengan yang lain, Pihak-pihak Berjanji Tertinggi hendaklah dipadukan oleh prinsip-prinsip asas berikut:

- a. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, kesatuan wilayah dan keberibadian bangsa semua negara;
- b. Hak tiap-tiap Negara untuk memimpin kehidupan bangsanya bebas daripada campurtangan, tindakan subversif atau paksaan dari luar;
- c. Tidak campurtangan dalam hal-ehwal dalam negeri di antara mereka;
- d. Penyelesaian perselisihan atau pertikaian dengan cara aman damai;
- e. Menjauhkan diri dari mengancam atau menggunakan kekerasan;
- f. Bekerjasama secara berkesan di antara mereka.

BAB II. PERSAHABATAN

Perkara 3. Pada menurut maksud Triti ini Pihak-pihak Berjanji Tertinggi hendaklah berusaha memaju dan mengukuhkan lagi hubungan persahabatan turun temurun, kebudayaan dan sejarah, perasaan berbaik-baik antara tetangga dan kerjasama yang mengeratkan hubungan antara mereka dan hendaklah dengan penuh kepercayaan menunaikan tanggungan yang diterima di bawah Triti ini. Bagi memajukan persefahaman yang lebih rapat antara mereka, Pihak-pihak Berjanji Tertinggi hendaklah menggalakan dan memudahkan kontak dan perhubungan antara rakyat-rakyat mereka.

BAB III. KERJASAMA

Perkara 4. Pihak-pihak Berjanji Tertinggi hendaklah memajukan kerjasama yang aktif dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, sains dan pentadbiran serta juga dalam perkara-perkara ideal dan cita-cita bersama tentang keamanan dan kestabilan antarabangsa dalam kawasan ini dan dalam lain-lain perkara kepentingan bersama.

Perkara 5. Menurut Perkara 4 Pihak-pihak Berjanji Tertinggi hendaklah berusaha sedaya upaya secara beramai-ramai serta juga secara dua pihak dengan berasaskan persamaan, tidak memperbeda-bedakan dan faedah bersama.

Perkara 6. Pihak-pihak Berjanji Tertinggi hendaklah bantu-membantu bagi mencepatkan lagi perkembangan ekonomi dalam kawasan ini supaya dapat dikuatkan asas bagi suatu masyarakat yang makmor dan aman di Asia Tenggara. Bagi maksud ini, mereka hendaklah memajukan penggunaan yang lebih banyak lagi pertanian dan perusahaan mereka, pengembangan perdagangan mereka dan mengelokkan lagi infra-struktur ekonomi bagi faedah bersama rakyat-rakyat mereka. Berkenaan dengan hal ini, mereka hendaklah berterusan mencari jalan bagi kerjasama yang rapat dan berfaedah dengan Negara-negara lain serta juga dengan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa dan kawasan di luar kawasan ini.

Perkara 7. Pihak-pihak Berjanji Tertinggi, untuk mencapai keadilan sosial dan meninggikan darjah hidup rakyat-rakyat dalam kawasan ini, hendaklah menggiatkan lagi kerjasama ekonomi. Bagi maksud ini, mereka hendaklah menggunakan strategi kawasan yang sesuai bagi membangunkan ekonomi dan saling bantu-membantu

Perkara 8. Pihak-pihak Berjanji Tertinggi hendaklah berusaha untuk mencapai kerjasama serapat-rapatnya dalam bidang yang seluas-luasnya dan hendaklah berikhtiar untuk mengadakan bantuan kepada sesama mereka dalam bentuk kemudahan latihan dan penyediaan dalam bidang-bidang sosial, kebudayaan, teknik, sains dan pentadbiran.

Perkara 9. Pihak-pihak Berjanji Tertinggi hendaklah berusaha untuk memupuk kerjasama pada memajukan keamanan, ketenteraman dan kestabilan dalam kawasan ini. Bagi maksud ini, Pihak-pihak Berjanji Tertinggi hendaklah senantiasa mengadakan hubungan dan rundingan antara mereka mengenai perkara-perkara antarabangsa dan kawasan dengan tujuan untuk menyatukan pendapat, tindakan dan polisi mereka.

Perkara 10. Tiap-tiap satu Pihak Berjanji Tertinggi tidak boleh dengan cara atau bentuk apa jua menyertai dalam apa-apa aktibiti yang akan menjadi suatu ancaman kepada kestabilan politik dan ekonomi, kedaulatan, atau kesatuan wilayah Pihak Berjanji Tertinggi yang satu lagi.

Perkara 11. Pihak-pihak Berjanji Tertinggi hendaklah berusaha mengukuhkan keteguhan kebangsaan masing-masing dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosio-kebudayaan serta juga keselamatan menepati dengan ideal dan cita-cita masing-masing, bebas dari campurtangan dari luar serta juga gerakan-gerakan subversif dari dalam supaya dapat mengekalkan keberibadian bangsa masing-masing.

Perkara 12. Pihak-pihak Berjanji Tertinggi dalam usaha-usaha mereka untuk mencapai kemakmuran dan keselamatan kawasan, hendaklah berusaha untuk berkerjasama dalam semua bidang bagi memajukan keteguhan kawasan, berasaskan kepada prinsip kepercayaan kepada diri sendiri, berdikari, saling menghormati, kerjasama dan perpaduan yang akan menjadi asas bagi suatu masyarakat negara-negara yang kuat dan teguh di Asia Tenggara.

BAB IV. PENYELESAIAN SECARA AMAN DAMAI PERTIKAIAN-PERTIKAIAN

Perkara 13. Pihak-pihak Berjanji Tertinggi hendaklah mempunyai azam dan suci hati untuk mengelak pertikaian berbangkit. Jika berbangkit pertikaian mengenai perkara-perkara yang secara langsung menyentuh mereka, terutama sekali pertikaian yang mungkin mengganggu keamanan dan ketenteraman kawasan, mereka hendaklah menahankan diri daripada mengancam atau menggunakan kekerasan dan hendaklah pada setiap masa menyelesaikan pertikaian-pertikaian di antara mereka itu melalui rundingan-rundingan secara bersahabat.

Perkara 14. Untuk menyelesaikan pertikaian melalui proses-proses kawasan, Pihak-pihak Berjanji Tertinggi hendaklah menubuhkan, sebagai suatu badan yang berterusan, suatu Majlis Tertinggi mengandungi suatu Perwakilan pada peringkat menteri dari tiap-tiap satu Pihak Berjanji Tertinggi untuk mengambil perhatian tentang adanya pertikaian atau keadaan yang mungkin mengganggu keamanan dan ketenteraman kawasan.

Perkara 15. Jika sekiranya tiada sesuatu jua penyelesaian dicapai melalui rundingan secara langsung, Majlis Tertinggi hendaklah mengambil tahu tentang pertikaian atau keadaan itu dan hendaklah mengesyorkan kepada pihak-pihak dalam pertikaian cara-cara penyelesaian yang sesuai sebagai jasa baik, perantaraan, penyiasatan atau pendamaian. Walau bagaimana pun Majlis Tertinggi boleh menawarkan jasa baiknya, atau dengan persetujuan pihak-pihak dalam pertikaian, menjadikan dirinya sebagai suatu jawatankuasa perantaraan, penyiasatan atau pendamaian. Apabila difikirkan perlu, Majlis Tertinggi hendaklah mengesyorkan langkah-langkah yang sesuai bagi mencegah pertikaian atau keadaan menjadi buruk.

Perkara 16. Peruntukan-peruntukan Bab ini yang tersebut di atas tidak boleh dipakai bagi sesuatu pertikaian melainkan jika semua pihak dalam pertikaian itu bersetuju peruntukan-peruntukan itu dipakai bagi pertikaian itu. Walau bagaimanapun, hal ini tidak boleh menghalang Pihak-pihak Berjanji Tertinggi lain, yang bukan pihak dalam pertikaian itu, daripada menawarkan segala bantuan yang boleh

untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Pihak-pihak dalam pertikaian itu hendaklah bersikap baik sangka terhadap tawaran-tawaran penyelesaian itu.

Perkara 17. Tiada sesuatu jua peruntukan dalam Triti ini boleh menghalangi pemakaian mode-mode penyelesaian secara aman yang terkandung dalam Perkara 33 (1) Piagam Bangsa-bangsa Bersatu. Pihak-pihak Berjanji Tertinggi dan yang menjadi pihak dalam pertikaian hendaklah digalakkan mengambil dayautama menyelesaikan pertikaian itu dengan rundingan-rundingan secara bersahabat sebelum menggunakan acara-acara lain yang diperuntukkan dalam Piagam Bangsa-bangsa Bersatu.

BAB V. PERUNTUKAN-PERUNTUKAN AM

Perkara 18. Triti ini hendaklah ditandatangani oleh Republik Indonesia, Malaysia, Republik Filipina, Republik Singapura dan Thailand. Ia hendaklah disahkan mengikut acara-acara perlembagaan tiap-tiap satu Negara yang menandatangani.

Triti ini hendaklah terbuka bagi penyertaan oleh lain-lain Negara di Asia Tenggara.

Perkara 19. Triti ini hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh dideposit suratcara pengesahan yang kelima dengan Kerajaan-kerajaan Negara yang menandatangani Triti ini iaitu yang dinamakan Pemegang Deposit Triti ini dan suratcara pengesahan atau penyertaan.

Perkara 20. Triti ini dibuat dalam bahasa-bahasa rasmi Pihak-pihak Berjanji Tertinggi, semua daripadanya adalah sah bersama. Hendaklah ada suatu terjemahan bersama yang dipersetujui bagi naskah-naskah itu dalam bahasa Inggeris. Mana-mana tafsiran yang berlainan bagi naskah bersama itu hendaklah diselesaikan dengan rundingan.

PADA MEMPERCAYAINYA Wakil Yang Berkuasa Penuh bagi Pihak-pihak Berjanji Tertinggi telah menandatangani Triti ini dan telah menurunkan cap mohor mereka kepadanya.

DIPERBUAT di Denpasar, Bali, pada dua-puluh empat haribulan Februari tahun satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam.

[PILIPINO TEXT — TEXTE PHILIPPIN]

KASUNDUAN SA PAGKAKAIBIGAN AT PAGTUTULUNGAN SA TIMOG-SILANGANG ASYA

PANIMULA

Ang mga Pangunahing Nagkakasundong Panig:

Batid ang mga umiiral na pagkakaugnay sa kasaysayan, heograpiya at kultura na bumubuklod sa kanilang mga mamamayan;

Inaasam ang pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon sa pamamagitan ng walang maliw na paggalang sa katarungan at sa bisa ng batas at pagpapalawak sa kaangkupan ng rehiyon sa kanilang pagkakaugnay;

Hangaring mapalawak ang kapayapaan, pagkakasundo at pagtutulongan ng isa't isa ukol sa mga bagay na may kinalaman sa Timog-silangang Asya na naaalinsunod sa diwa at mga simulain ng Karta ng mga Nagkakaisang Bansa, ang Sampung Panuntunan ng Asian-African Conference na idinaos sa Bandung noong Abril 25, 1955, ang Deklarasyon ng Asosasyon ng mga Bansa sa Timog-silangang Asya na nilagdaan sa Bangkok noong Agosto 8, 1967, at ang Deklarasyon na nilagdaan sa Kuala Lumpur noong Nobyembre 27, 1971;

Naniniwala na ang paglutas sa mga hidwaan o sigalutan ng mga bansa sa Timog-silangang Asya ay dapat gawin sa pamamagitan ng mga paraang makatwiran, mabisa at may sapat na kaangkupan, na umiiwas sa mga salungat na pakikitungo na maaaring magsapanganib o makasagabal sa pagtutulongan ng rehiyon;

Nananalig sa pangangailangang magkatulungan ang lahat ng bansang mapagmahal sa kapayapaan, maging sa saklaw at labas ng Timog-silangang Asya upang lalong mapalawak ang kapayapaan, katatagan at pagkakasundo ng daigdig;

Ay matapat na nagkakaisang magbuklod sa Kasunduan sa Pagkakaibigan at Pagtutulongan gaya ng sumusunod:

KABANATA I. MGA LAYUNIN AT PANUNTUNAN

Artikulo 1. Layunin ng Kasunduang ito na itaguyod ang panghabangpanahong kapayapaan, walang maliw na pagkakaibigan at pagtutulongan ng kanilang mga mamamayan na makatutulong sa kanilang katatagan, pagkakaisa at mataalik na pakikipag-ugnayan.

Artikulo 2. Sa kanilang pakikitungo sa isa't isa, ang mga Pangunahing Nagkakasundong Panig ay papatnubayan ng mga sumusunod na pangunahing panuntunan:

- (a) Paggalang ng isa't isa sa kalayaan, kapangyarihan, pagkakapantay-pantay, kabuuang saklaw na lupain at pambansang pagkakakilanlan ng lahat ng bansa;
- (b) Ang karapatan ng bawat Bansa na pamahalaan ang pambansang pamumuhay nito na malaya sa panlabas na panghihimasok, subersiyon o panggigipit;
- (c) Di-panghihimasok sa mga suliraning panloob ng bawat isa;
- (d) Paglutas sa mga hidwaan o sigalutan sa pamamagitan ng payapang paraan;
- (e) Pagtatakwil sa banta o paggamit ng lakas;
- (f) Mabisang pagtutulongan sa isa't isa.

KABANATA II. PAGKAKAIBIGAN

Artikulo 3. Bilang pag-alinsunod sa layunin ng Kasunduang ito, sisikapin ng mga Pangunahing Nagkakasundong Panig na pagyamanin at patatagin ang pang-kaugalian, pangkalinangan at pangkasaysayang bigkis ng pagkakaibigan, mabuting pakikitungo at pagtutulungang bumubuklod sa kanila at buong tapat na isasakap-tuparan ang mga pananagutang nakatalaga sa ilalim ng Kasunduang ito. Upang maitaguyod ang kanilang malapit na pagkakaunawaan, pasisiglahin at pagagaanin ng mga Pangunahing Nagkakasundong Panig ang ugnayan at palagayan ng kani-kanilang mamamayan.

KABANATA III. PAGTUTULUNGAN

Artikulo 4. Itataguyod ng mga Pangunahing Nagkakasundong Panig ang masigasig na pagtutulungan sa mga larangang pangkabuhayan, panlipunan, pangkalinangan, teknikal, pang-agham at pampangasiwaan at maging sa mga bagay na may kinalaman sa mga mithiin at hangarin ng lahat, sa kapayapaang pandaigdig at katatagan sa rehiyon at lahat ng iba pang bagay na ikabubuti ng lahat.

Artikulo 5. Batay sa Artikulo 4, isasagawa ng mga Pangunahing Nagkakasundong Panig ang kanilang lubusang pagsisikap na pangmaramihan at maging pandalawahan batay sa pagkakapantay-pantay, walang pagtatangi at kapakanan ng isa't isa.

Artikulo 6. Magtutulungan ang mga Pangunahing Nagkakasundong Panig sa pagpapabilis ng kaunlarang pangkabuhayan sa rehiyon upang mapatibay ang pagtatatag ng isang maunlad at payapang pamayanan ng mga bansa sa Timog-silangang Asya. Sa ganitong layunin, itataguyod nila ang higit na pakikinabang sa kanilang pagsasaka at industriya, ang pagpapalawak sa kanilang kalakalan at ang pagpapalunlad ng kanilang katatagang pangkabuhayan para sa kapakinabangan ng kani-kanilang mga mamamayan. Sa bagay na ito, patuloy silang hahanap ng lahat ng paraan para sa malapit at kapakipakinabang na pakikipagtulungan sa iba pang Bansa at maging sa mga organisasyong pandaigdig at organisasyong panrehiyon sa labas ng rehiyon.

Artikulo 7. Palalawakin ng mga Pangunahing Nagkakasundong Panig ang pagtutulungan pangkabuhayan upang matamo ang katarungang panlipunan at umangat ang kalagayan sa pamumuhay ng mga mamamayan ng rehiyon. Sa layuning ito, magsasagawa sila ng mga naaangkop na paraan para sa kaunlarang pangkabuhayan at pagtutulungan ng isa't isa.

Artikulo 8. Magpupunyagi ang mga Pangunahing Nagkakasundong Panig na matamo ang pinakamalapit na pagtutulungan sa pinakamalawak na kalagayan at sisikapin makatulong sa isa't isa sa pamamagitan ng mga kagamitan sa pagsasanay at pananaliksik sa mga larangang panlipunan, pangkalinangan, teknikal, pang-agham at pampangasiwaan.

Artikulo 9. Sisikapin ng mga Pangunahing Nagkakasundong Panig na palawakin ang pagtutulungan sa lalong ikalalaganap ng kapayapaan, pagkakasundo at katatagan sa rehiyon. Sa layuning ito, pananatilihin ng mga Pangunahing Nagkakasundong Panig ang palagiang pakikipag-ugnayan at pakikipagsanggunian sa isa't isa tungkol sa mga pangunahing suliraning pandaigdig at panrehiyon sa hangad na mapagtugma-tugma ang kanilang mga kaalaman, gawain at patakaran.

Artikulo 10. Hindi makikisangkot, sa ano mang uri o paraan, ang bawat Pangunahing Nagkakasundong Panig sa anumang kilusan na magsasapanganib sa kataagan ng pamahalaan at kabuhayan, kapangyarihan, o kabuuang saklaw na teritoryo ng isang Pangunahing Nagkakasundong Panig.

Artikulo 11. Sisikapin ng mga Pangunahing Nagkakasundong Panig na palakasin ang kani-kanilang pambansang kaangkupan sa kanilang mga kaalamang pampamahalaan, pangkabuhayan, kalinangang panlipunan at maging sa katiwasayan, alinsunod sa kani-kanilang lunggati at mithiin, na malaya sa panghihimasok ng dayuhan at maging sa mga panloob na kilusang mapanghimagsik upang mapangalagaan ang kani-kanilang pambansang pagkakakilanlan.

Artikulo 12. Sisikapin ng mga Pangunahing Nagkakasundong Panig, sa kanilang pagpupunyaging matamo ang kaunlaran at katiwasayan sa rehiyon, na maki-pagtulungan sa lahat ng larangan para sa pagtataguyod ng kaangkupang pan-rehiyon, batay sa mga simulain ng pagtitiwala sa sariling kakayahan, sariling kaganapan, paggalang sa isa't isa, pagtutulungan at pagkakaisa na bubuo sa katatagan ng isang matatag at umiiral na pamayanan ng mga bansa sa Timog-silangang Asya.

KABANATA IV. PAYAPANG PAG-AAYOS NG MGA SIGALUTAN

Artikulo 13. Buong kasigasigan at katapatang hahadlangan ng mga Pangunahing Nagkakasundong Panig ang pagkakaroon ng mga sigalutan. Sakaling magkaroon ng mga sigalutan na tuwirang makapipinsala sa kanila, lalo na ang mga sigalutang makagagambala sa kapayapaan at pagkakasundo ng rehiyon, iiwasan nila ang pagbabanta o paggamit ng lakas at sila na rin ang aayos ng gayong mga sigalutan sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ng maayos na pakikipagkasunduan.

Artikulo 14. Upang maayos ang mga sigalutan sa pamamagitan ng mga pamamaraang panrehiyon, bubuo ng isang Pangunahing Lupon ang mga Pangunahing Nagkakasundong Panig, bilang isang palagiang pangkat na kabibilangan ng isang sugong Kinatawan mula sa bawat Pangunahing Nagkakasundong Panig upang alamin ang pagkakaroon ng mga sigalutan o kalagayang maaaring makagambala sa kapayapaan at pagkakasundo sa rehiyon.

Artikulo 15. Sakaling hindi magkaroon ng kalutasan sa pamamagitan ng tuwirang pakikipagkasundo, aalamin ng Pangunahing Lupon ang sigalutan o ang kalagayan at magtatagubilin sa nagkakahidwaang panig ng naaangkop na paraan ng pag-aayos tulad ng mga wastong pamamagitan, pagsisiyasat o pagkakasundo. Gayon man, maaaring mag-alok ng wastong pamamagitan ang Pangunahing Lupon o sa kasunduan ng nagkakahidwaang panig ay sila na ang bumuo ng isang lupon mamamagitan, magsisiyasat o mag-aayos. Kapag inaakalang kailangan, magtatagubilin ang Pangunahing Lupon ng mga naaangkop na hakbang para maiwasan ang paglala ng sigalutan o ng kalagayan.

Artikulo 16. Ang mga nauunang tadhana ng Kabanatang ito ay hindi mauukol sa isang sigalutan kapag hindi sumasang-ayon ang lahat ng kasangkot sa sigalutan na maukol ito sa gayong sigalutan. Gayon man, hindi ito hadlang sa ibang mga Pangunahing Nagkakasundong Panig na hindi kasangkot sa sigalutan upang mag-alok ng lahat ng maaaring tulong sa ikalulutas ng nasabing sigalutan. Kailangang maluwag sa kalooban na tanggapin ng mga kasangkot sa sigalutan ang gayong mga alok na tulong.

Artikulo 17. Hindi hadlang ang alinmang napapaloob sa Kasunduang ito upang dumulog sa mga paraan ng payapang pag-aayos na napapaloob sa Artikulo 33 (1) ng Karta ng mga Nagkakaisang Bansa. Hihimukin ang mga Pangunahing Nagkakasundong Panig na kasangkot sa isang sigalutan na kusang gumawa ng paraan upang malutas ito sa pamamagitan ng maayos na pakikipagkasundo bago gawin ang iba pang paraan na itinatakda sa Karta ng mga Nagkakaisang Bansa.

KABANATA V. MGA PANGKALAHATANG TADHANA

Artikulo 18. Lalagda sa Kasunduang ito ang Republika ng Indonesya, Malaysia, ang Republika ng Pilipinas, ang Republika ng Singapore at ang Kaharian ng Thailand. Pagtitibayin ito alinsunod sa mga pamamaraang konstitusyonal ng bawat nakalagdagang Bansa.

Bukas ito sa pakikiisa ng iba pang bansa sa Timog-silangang Asya.

Artikulo 19. Magkakabisa ang Kasunduang ito sa araw na mailagak ang ika-limang kasulatan sa pagkakapatibay sa mga Pamahalaan ng nakalagdagang Bansa na itinalagang mga Lagakan ng Kasunduang ito at ng mga kasulatan sa pagkakapatibay o pagkakaisa.

Artikulo 20. Inihanda ang Kasunduang ito sa wikang opisyal ng mga Pangunahing Nagkakasundong Panig, na lahat ay pawang mapananaligan. Magkakaroon ng isang pinagkasunduang salin ng teksto sa wikang Ingles para sa lahat. Aayusin sa pamamagitan ng pag-uunawaan ang ano mang naiibang pagpapakahulugan sa tekstong para sa lahat.

BILANG PANGSANG-AYON, lumagda sa Kasunduang ito ang mga Pangunahing Nagkakasundong Panig at ikinintal dito ang kanilang mga TATAK.

GINAWA sa Denpasar, Bali, ngayong ika-Dalawampu't Apat na Araw ng Pebrero sa taong Isang Libo Siyam na Raan at Pitumpu't Anim.

ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและความร่วมมือกันซึ่งผูกพันกันไว้อย่างแน่นแฟ้น และจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อผูกพันที่รับว่าจะปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้โดยสุจริต เพื่อที่จะส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น อัครราชทูตทำสัญญาจักสนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่การศึกษาและความเกี่ยวพันกันระหว่างประชาชนของตน

บทที่ 3
ความร่วมมือ

ข้อ 4

อัครราชทูตทำสัญญาจักส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันอย่างจริงจังในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และการบริหารกับทั้งในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับอุดมคติและปณิธานร่วมกันเกี่ยวกับสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างประเทศในภูมิภาค และเรื่องอื่น ๆ ทั้งปวงอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อ 5

โดยอนุวัติตามข้อ 4 อัครราชทูตทำสัญญาจักใช้ความพยายามมากที่สุดทั้งที่เป็นการหลายฝ่ายและสองฝ่ายตามมูลฐานแห่งความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ และเกื้อหนุนประโยชน์แก่กันและกัน

ข้อ 6

อัครราชทูตทำสัญญาจักร่วมมือกันเพื่อเร่งรัดให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อที่จะเสริมสร้างรากฐานประชาคมของประชาชาติใหม่ที่มีความโปร่งใส และมีสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อจุดมุ่งหมายนี้ อัครราชทูตทำสัญญาจักส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ให้มีการขยายตัวทางการค้าและปรับปรุงพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเพื่อคุณประโยชน์ซึ่งกันและกันของประชาชนของตน ในการนี้ อัครราชทูตทำสัญญาจักค้นหาหนทางทั้งปวงสืบไปเพื่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

และอำนวยความสะดวกกับรัฐอื่น ๆ ทั้งกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การ
ส่วนภูมิภาคซึ่งอยู่ภายนอกภูมิภาคนี้ด้วย

ข้อ 7

อัครราชทูตทำสัญญาจักขยายความร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจ
เพื่อให้บรรลุถึงความยุติธรรมทางสังคมและเพื่อยกมาตรฐานการครองชีพของ
ประชาชนในภูมิภาคเพื่อความมุ่งประสงค์นี้ จักรับเอายุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
ของภูมิภาคเพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ข้อ 8

อัครราชทูตทำสัญญาจักพยายามให้บรรลุถึงความร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดที่สุดตามมาตรฐานที่กว้างขวางยิ่ง และจะหาทางให้ความช่วยเหลือ
แก่กันและกันในรูปการให้ความสะดวกเกี่ยวกับการฝึกอบรมและการวิจัยใน
ด้านสังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และการบริหาร

ข้อ 9

อัครราชทูตทำสัญญาจักพยายามสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันยิ่ง
ขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมอุดมการณ์แห่งสันติภาพ ความสมัครสมาน และเสถียรภาพ
ในภูมิภาคเพื่อจุดมุ่งหมายนี้ อัครราชทูตทำสัญญาจักดำรงไว้ซึ่งการติดต่อและการ
ปรึกษาหารือกันเป็นประจำในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการระหว่างประเทศ
และเกี่ยวกับภูมิภาคเพื่อประสานทัศนคติ การกระทำ และนโยบายของตนเข้า
ด้วยกัน

ข้อ 10

อัครราชทูตทำสัญญาแต่ละฝ่ายจักไม่เข้ามีส่วนร่วมไม่ว่าในทำนอง
หรือรูปแบบใด ๆ ในกิจกรรมซึ่งจะก่อให้เกิดการคุกคามต่อเสถียรภาพทาง
การเมือง และเศรษฐกิจ อธิปไตย หรือบูรณภาพแห่งดินแดนของอัครราชทูตทำ
สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

ระเทศนฤปราชโอรสเมืองพิษณุพนมจะระบฏในกรุงรัตนนครของสุโขทัยซึ่งมีเจ้าฟ้าสุพรรณ
ศรี มลมาลีเป็นองค์ โสภิตาภรรยาของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี

๕๑

สมเด็จพระเจ้าบรมโกศเป็นองค์พระอัยยิกาของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี
บุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี
บุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี
บุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี
บุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี

๕๒

เจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี

๕๓

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี
บุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี
บุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี
บุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี
บุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี

๕๔

เจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี
บุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี
บุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี
บุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี
บุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณีบุตรของเจ้าแก้วมณี

๕๕

หนึ่งประกอบด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากอิครภาคิผู้ทำสัญญาแต่ละฝ่าย เพื่อ
รับทราบกรณีพิพาทที่มีอยู่ หรือรับทราบสถานการณ์ที่น่าจะก่อความระส่ำระ
สายคอสนธิภาพและความสมัครสมานกันในภูมิภาค

ข้อ 15

ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้โดยการเจรจาโดยตรง คณะ
อัครมนตรีจักรับทราบกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ และจักทำข้อเสนอแนะให้คู่
กรณีในกรณีพิพาททราบวิธีระงับกรณีที่เหมาะสม เช่นการไต่สวนการประสาน
ไมตรี การไกล่เกลี่ย การไต่สวน หรือการประนีประนอม อย่างไรก็ตาม คณะ
อัครมนตรีอาจเสนอตนเป็นผู้ให้บริการประสานไมตรี หรือเมื่อคู่กรณีในกรณี
พิพาทไต่ตกลงกัน คณะอัครมนตรีอาจทั้งตนเองเป็นคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
คณะกรรมการไต่สวน หรือคณะกรรมการประนีประนอมได้ เมื่อเห็นว่าจำเป็น
คณะอัครมนตรีจะได้เสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเสื่อม
ทรามลงของกรณีพิพาทหรือสถานการณ์นั้น

ข้อ 16

ข้อบทที่กล่าวมาแล้วแห่งบทนี้จะไม่ใช่กับกรณีพิพาทกรณีหนึ่งกรณี
ใดเว้นเสียแต่คู่กรณีทั้งปวงในกรณีพิพาทจะตกลงกันให้ไรชอบท่าง ๆ นี้กับ
กรณีพิพาทนั้น อย่างไรก็ตาม ความข้อนี้ไม่เป็นการกีดกันอิครภาคิผู้ทำสัญญา
อื่น ๆ ซึ่งมีได้เป็นคู่กรณีในกรณีพิพาทที่จะเสนอให้ความช่วยเหลืออันถึงเป็น
ไปได้ทั้งปวงเพื่อระงับกรณีพิพาทดังกล่าว คู่กรณีในกรณีพิพาทจะต้องมีใจเอื้อ
อำนวยต่อขอเสนอให้ความช่วยเหลือเช่นนั้น

ข้อ 17

ความในสนธิสัญญานี้มิให้เป็นอันกีดกันการอาศัยวิธีระงับกรณีโดย
สันติที่มีอยู่ในมาตรา 33 (1) แห่งกฎบัตรสหประชาชาติ อิครภาคิผู้ทำสัญญา
ซึ่งเป็นคู่กรณีในกรณีพิพาทจักได้รับความสนับสนุนให้ริเริ่มเพื่อระงับ
กรณีพิพาทนั้น โดยการเจรจาฉันมิตรก่อนที่จะอาศัยกระบวนการอื่น ๆ ตามที่

บัญญัติไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ

บทที่ 5

บทบัญญัติทั่วไป

ขอ 18

สนธิสัญญานี้จักมีการลงนามโดยสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย สนธิสัญญาจักได้รับสัตยาบันตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของรัฐผู้ลงนามแต่ละรัฐ

สนธิสัญญานี้จักเปิดให้มีการภาคยานุวัติโดยรัฐอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขอ 19

สนธิสัญญานี้จักเริ่มใช้บังคับในวันมอบสัตยาบันสารฉบับที่ห้าไว้กับรัฐบาลของรัฐผู้ลงนามใด ๆ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบสนธิสัญญานี้ และเป็นผู้รับมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร

ขอ 20

สนธิสัญญานี้ได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาทางราชการของอัครราชทูตผู้ทำสัญญา ซึ่งทุกภาษาใช้เป็นหลักฐานได้เท่ากัน จะมีคำแปลด้วยบทต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษตามที่ตกลงร่วมกันไว้ การตีความที่แตกต่างกันไป ในตัวบทร่วมกันนั้นจะตกลงกันโดยการเจรจา

เพื่อความสุจริตใจในการนี้ อัครราชทูตผู้ทำสัญญาได้ลงนามสนธิสัญญาและประทับตราของตนไว้ในสนธิสัญญานี้

ทำ ณ กรุงปารีส บาดส์ เมื่อวันที่ยี่สิบสี่ เดือนกุมภาพันธ์
ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหก

Untuk Republik Indonesia:
Bagi Pihak Republik Indonesia:
Para sa Republika ng Indonesya:
สำหรับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ;
For the Republic of Indonesia:

[*Signed — Signé*]
SOEHARTO
President

Untuk Malaysia:
Bagi Pihak Malaysia:
Para sa Malaysia:
สำหรับมาเลเซีย ;
For Malaysia:

[*Signed — Signé*]
DATUK HUSSEIN ONN
Prime Minister

Untuk Republik Pilipina:
Bagi Pihak Republik Filipina:
Para sa Republika ng Pilipinas:
สำหรับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ;
For the Republic of the Philippines:

[*Signed — Signé*]
FERDINAND E. MARCOS
President

Untuk Republik Singapura:
Bagi Pihak Republik Singapura:
Para sa Republika ng Singapore:
สำหรับสาธารณรัฐสิงคโปร์
For the Republic of Singapore:

[*Signed — Signé*]
LEE KUAN YEW
Prime Minister

Untuk Kerajaan Thailand:
Bagi Pihak Thailand:
Para sa Kaharian ng Thailand:
สำหรับราชอาณาจักรไทย
For the Kingdom of Thailand:

[*Signed — Signé*]
KUKRIT PRAMOJ
Prime Minister